RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) **TAHUN 2023-2026 KECAMATAN PANDANARUM** KABUPATEN BANJARNEGARA



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA **KECAMATAN PANDANARUM**

Jl. Raya Pandanarum Km 1

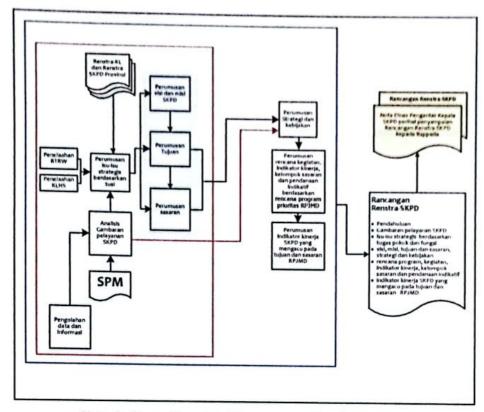
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan pandanarum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Kecamatan pandanarum. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Kecamatan pandanarum (Renstra Kecamatan pandanarum) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan pandanarum jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan pandanarum, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan pandanarum Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Kecamatan pandanarum juga mengacu pada RPD Kabupaten Banjanegara tan 2023 - 2026, serta Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Kecamatan pandanarum adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.



Keterkaitan Renstra Kecamatan Pandanarum dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026

Penyusunan Renstra Kecamatan Pandanarum dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Pandanarum, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan "Stakeholders".

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Pandanarum ini berlaku tahun 2023 hingga 2026 selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Pandanarum ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pandanarum setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pandanarum Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5495);Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenblatur Perencapaan Pembangunan
- Peraturan Daerah Provinst Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinst Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinst Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinst Jawa Tengah Nomor 9);
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Neucana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Puang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 tentang Rencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarengara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
- Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).
- 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

- a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pandanarum dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Pandanarum guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.
- c. Sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan yang didasarkan pada visi misi RPJMD

1.4 Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra PD Kecamatan Pandanarum Tahun 2023 - 2026 disusun dan termuat dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, proses penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan kondisi umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD (SDM berdasarkan gender dan Asset) serta penjabaran tingkat capaian kinerja PD periode sebelumnya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan pada Perangkat Daerah Kecamatan,
melakukan penilaian (scoring) terhadap permasalahan yang
memiliki dampak yang besar terhadap publik dan pencapaian
sasaran Renstra, diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima Tahun mendatang Strategi menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dirancang secara rasional dan komprehensip, sedangkan kebijakan menerangkan arah yang akan diambil Perangkat Daerah dalam bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan Penjelasan yang bersifat umum dari Program dan

Kegiatan beserta indikasi pendanaan dalam periode lima tahun

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Pandanarum yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2023 - 2026

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada:
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;

 Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Pagedongan sejak Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Pandanarum dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyeelnggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijikan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemelihraan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamtan dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelakanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

bahan penyiapan Mempunyai tugas melakukan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporankebijakan dan evaluasi fasilitasi, pemantauan, kerjasama, kerumahtanggaan, bidangketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan, keorganisasian dan kearsipan, dokumen, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk sebagian urusan pemerintahan di bidang tata menangani pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di penyusunan dokumen perencanaan kecamatan, tingkat pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Belanja Desa, sertapelaksanaan Pendapatan dan Anggaran kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan

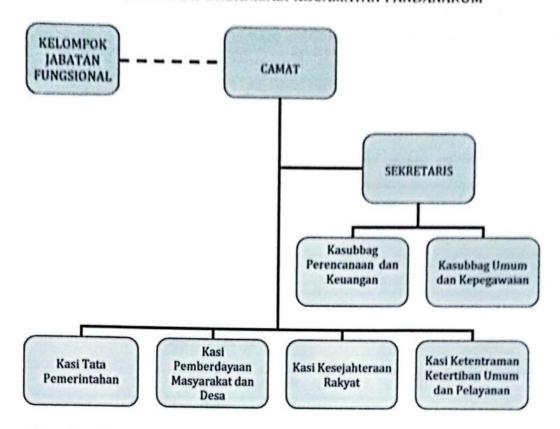
dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya. keagamaan, kesehatan pendidikan, dan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dala melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati Camat, percepatan kepada pencapaianstandar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Pandanarum berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANDANARUM



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Gambaran Umum

Kecamatan Pandanarum merupakan satu dari dua puluh kecamatan di kabupaten Banjarnegara yang terletak 30 km sebelah Utara ibukota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Kalibening Sebelah Selatan : Kabupaten punggelan

Sebelah Timur : Kecamatan kalibening, Punggelan

Sebelah Barat : Kecamatan punggelan dan kab, purbalingga

Luas wilayah kecamatan Pandanarum adalah 5.8556.05 Ha yang terdiri dari desa yaitu :pandanarum,Sinduaji, Beji,pring Amba,pasegeran,lawen,pringamba. Dengan jumlah penduduk sebanyak 20 406 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki 10 199 jiwa dan penduduk perempuan 10 207 jiwa. Dengan keadaan tanah tanah hijau.

2.2.2. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pandanarum memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan pandanarum saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 28 (Dua puluh delapan) Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 13 (tiga belas) PNS dan 3 (Tiga) Non PNS dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 2.2.2.1 SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	11	3	85
2	Perempuan	2	0	15
	JUMLAH TOTAL	13	3	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2 SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT	Pl	NS	NON	PNS	%
NO	PENDIDIKAN	L	P	L	P	%
1	STRATA 2					
2	STRATA 1	4	1			33
3	SARJANA MUDA / D3					-
4	SLTA	5	1	3		77
5	SLTP					
6	SD					
	JUMLAH TOTAL	9	2	3		100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatar

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b			
2	PEMBINA /IV a	3		8,33
3	PENATA TK. I / III d	1	2	25
4	PENATA / III c	1		8,33
5	PENATA MUDA TK. I / III b			16,67
6	PENATA MUDA / III a			
7	PENGATUR TK. I / II d	1	1	33,33
8	PENGATUR / II c	1		8,33
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	3		
10	PENGATUR MUDA / II a	2		
11	JURU TK. I / I d			
12	JURU / I c			
13	JURU MUDA TK. I / I b			
14	JURU MUDA / I a			
	JUMLAH TOTAL	9	3	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4 SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONG AN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a			-
2	ESELON III b	1	-	14,29
3	ESELON IV a	3		57,14
4	ESELON IV b	1	1	28,57
	JUMLAH TOTAL	5	1	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5 SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	11	20
2	Perempuan	2	8
	JUMLAH TOTAL	13	28

2.2.3. Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pandanarum memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.1 Sarana Prasarana Asset Kecamatan Pandanarum

No	Nama Asset	Jumlah 2015	Kondisi (Baik/Rusak)	Barang Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	Pengecatan
2	Aula Kecamatan	1 unit	Rusak	Rehab
3	Rumdin Camat	1 unit	Rusak	Rehab
4	Rumsek Cam	1	rusak	Rehab
5	Sepeda Motor	6	baik	тамван
6	televisi	2	Rusak Berat	HAPUS
7	Salon		baik	CUKUP
8	Letop	6	baik	cukup

9	Lemari Besi	2	Balk	ТАМВАН
10	Filling Besi/Metal	2	Baik	ТАМВАН
11	Filling Besi/Metal	3	Rusak Berat	HAPUS
12	Meja Kayu/Rotan	13	Baik	ТАМВАН
13	Kursi Besi/Metal	17	baik	ТАМВАН
14	Tempat Tidur Kayu	3	Rusak	CUKUP
15	Meja Makan	1	Baik	CUKUP
16	Meja Panjang	3	Baik	CUKUP
17	Kursi Tamu	3	Baik	ТАМВАН
18	Kursi Rapat	32	Baik	ТАМВАН
19	Bangku tunggu	4	Rusak	GANTI & TAMBAH
20	Meja televisi	2	Baik	Cukup
21	kompor	1	Baik	Tambah
22	AC Unit	1	RUSAK BERAT	GANTI & TAMBAH
23	Mobil dinas	1	baik	baik
24	Televisi	2	RUSAK BERAT	HAPUS
25	Camera Video	1	RUSAK BERAT	HAPUS & GANTI
26	Tustel	1	RUSAK BERAT	HAPUS
27	P.C Unit	3	Rusak	ТАМВАН
28	P.C Unit	1	RUSAK BERAT	HAPUS
29	kopmputer	2	BAIK	ТАМВАН

30	dapurLemari	2	RUSAK BERAT	HAPUS
31	Printer	6	baik	TAMBAB
32	Printer	2	RUSAK BERAT	HAPUS
33	Dipan	2	batk	CUKUP
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	balk	CUKUP
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	bník	CUKUP
36	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	Rusak Ringan	GANTI
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	baik	ТАМВАН
38	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	baik	CUKUP
39	Camera + Attachment	1	baik	CUKUP
40	Proyektor + Attachment	1	Rusak	Ganti
41	Compact Disc. Player	1	baik	CUKUP
42	Microphone/Wireless Mic	1	RUSAK BERAT	HAPUS
43	internet	1	baik	cukup
44	Kasur	2	RUSAK BERAT	HAPUS
45	Slide Projector (Lapangan)	1	RUSAK BERAT	HAPUS
46	Sound System	1	Rusak	GANTI
47	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	1	baik	CUKUP

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah menge tahui trend tersebut, baru akan

didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untukmengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pandanarum tahun 2017-2022 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA

No				-			w		4-		s			0			-1			œ				P-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T		٥		-
Tugas Pokok dan Pungsi	Jumlah dokumen	perencanaan yang tersusun			Jumlah dokumenpelaporan	insism flat	Terpenuhinya Gaji dan	Tunjangan ASN	Jumlah jasa adm. keuangan	yang terbayarkan	Jumiah dokumen keuangan	yang disusun		Jumlah peralatan kebersihan	dan bahan pembersih yang	terpenuhi	Jumlah bahan logistik yang	terpenuhi		Jumiah Unit Sarana dan	Prasurana Gedung Kantor	atau Rangunan Lamnya yang	President and particular particular	- TOWN CHARACTER		Terpenuhmya Jasa	Penunjang Urusan	Pemerintahan Daerah
SPW -									,					c			•			•			-	_				-
200					,									,				_				_						er Francisco
Indikator					,												3									,		
2017	00	dok	ume	n	doku	ment	17		6	gro					pake	-	œ	pake	-	,						100		
2018	8	dok	ume	n	doku	ment	16		6	Sto	œ	dok	um	-	pake	-	œ	pake	-	2	paket		-			100		
2018 2019 2020	00	dok	ume	n	doku	ment	16		6	Sto	œ	dok	um		pake	-	œ	pake	-	2	paket	9	Mabe	lair +	op	100		
2020	8	dok	ume	n	doku	ment	15		6	Sto	8	dok	um		pake	-	œ	pake	-	1	Paket	Mabe	lair			100		
2021	8	dok	ume	n	doku	ment	14		6	Sto	00	dok	um		pake	-	œ	pake	-	1	paket	Kom	puter			100		
	8	dok	ume	n	doku	ment	17		6	gro	,				pake	-	œ	pake	-	100						100		
2017 2018	8	dok	ume	n	Paket	Lanci	16		6	org	œ	dok	um		pake	~	œ	pake	-	100						100		
2019	00	dok	ume	ם	Paker		16		6	gro	œ	dok	um		pake	-	œ	pake	-	100						100		
2018 2019 2020	8	dok	ume	n	Paket	I and	15		6	org	00	dok	um		pake	-	œ	pake	-	100						100		
2021	8	dok	ume	5	Paket	, and	14		6	Slo	œ	dok	um		pake	~	œ	pake	-	100						100		
2017	100				100		100		100					100			100			100						100		
2018	100	-	-		100		100		100		100			100			100			100						100		
2018 2019 2020	100	*******			100		100		100		100			100			100			100						100		
2020	100				100		100		100		100			100			100			100						100		
2021	100		****		100		100		100		100			100			100			100		-				100		

												10
Jumlah pembinaan administrasi tat pemerintahan desa yang	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang di susun	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan yang terlaksana	Jumlah SPPT yang disalurkan ke wajib pajak	Jumlah Penanganan Pengaduan	Jumlah Pelayanan KK yang terlayani	Jumlah Pelayanan KTP yang terlayani	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Jumlah jasa pelayanan umum yang terbayarkan	Jumlah jasa hstrik yang tersedia Air dan Listrik
		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100

Jumiah Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya yang terlaksana	penyusunan program dan pelakumaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlakuana	Juniah desa terth ketentraman dan keterthan umum yang terlaksana	Juniah desa terub administras pembangunan yang terlahkana	Jumlah Desa tertib administrasi Keuangan dan pendajugunaan aset desa yang terlaksuna	tertaksana
100		100	100	100	
100		100	100	100	
100		100	100	100	

Sumber : LKj IP Kecamatan Pagedongan (diolah)

yang berlaku dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2022 relatif

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;

- * Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Pandanarum dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- ٠ Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- Pandanarum sehingga untuk mengakses kegiatan- kegiatan masih pakai modem, belum tersentuhnya pengelolaan arsip, belum adanya Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Belum adanya telepon atau Wifi ke Kecamatan Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara;

petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

TABEL 2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA

No			1	2	ω		4	(J	6	7	n = -	-		> 0	77 20
Program dan Kegiatan		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan	peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Jasa Admi-nistrasi	Pemberdayaan Kecamatan	Penunjang operasional desa	berdikari,desa pemula,& desa prakarsa	Peningkatan Sarana	dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan	
	2017		9.798	0		0	32.899,5	22.463	30.000		•				
Anggaran Pada Tahun Ke-	2018		5.340	0		0	33.860	22.463	25.000						
n Pada Ta	2019		8.640	17.880		0	67.600	21.320	39.200		0				
ahun Ke-	2020		10.800	24.000		0	50.000	21.320	44.200	r	0				
	2021		12.000	24.050		2.000	62.900	38.315	60.880		5.000				
Reali	2017		6.038	0			26.252	16.665	27.461		0				
Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-	2018					•									
garan Pa	2019		8.640	17.740		0	32,393	19.220	12.719		0				
da Tahui	2020		8.252	15.075		0	32.364	19.260	28.256		0				
ı Ke-	2021		8.136	20.750		1.666	61.768	37.435	60.680		4.750				
Rasio	2017		61,62				79,79	74,19	91,54						
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	2018														
Realisasi o Tahun Ke-	2019		100	99,22			47,92	90,15	32,45						
dan Ang	202		95,52	62,81			80,91	90,34	72,08						
garan	2021		67,81	86,28		83,28	98,20	97,70	99,67		95,00				
Rata-rata Pertumbuha	Angg		8.884	21.977		2.000	47.452	25.176	38.856		5.000				
Rata-rata Pertumbuha	Realis		7.767	17.855		1.666	38.194	23.145	32.279		4.750				

dalam ribuan rupiah

4	1		2	-			****	1	**********	4	ω	N
Peringkatan & pengembangan removalolaan	njar	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuargan desa	araan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Penataan Administrasi Kependudukan	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD	Peringkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Asistensi PATEN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	remeinaraan rutin/ berkala rumah jabatan
				5,000						11.292	31111	8
			128.724	5,000						13.332	3.111	83
	93.300			5,000						15.000	5.000	3.000
				5.000				5.000		8000	5.000	3000
				5,000		4.500		5.000		30.000	10.000	7.000
				3.788						11.143	2.985	627
	89.225			4.389						6.497	5.000	3.000
				2.896				5.000		17.583	3.830	2500
				4.955		4.500		5.000		26.419	8.895	5.925
				75,76						98,68	95,95	100
										0,00	0,00	0,00
	95,63			88,00						43	100	100
				57,92				100		76,45	76,60	83,33
				99,10		100		100		88,06	88,95	84,64
	93.300		128.72	5.000		4.500		5.000		18.525	5.244	2.851
	89.225			4.007		4.500		5.000		15.411	5.178	3.013

-								-	-		-	STREET, STREET
-	Intensifikasi Pajak Daerah		14.431	8.935		14.431	8.935		100	100	0	11.683
	Peningkatan Sarana				-							
	& Prasarana	_										
	Wilayah				_							
-	Peningkatan sarana											
	dan prasarana		300.000	300.000	_	300.000	300 000		100	100	0	0
	yah ke								_			

Banjarnegara dapat diserap secara baik. dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Pandanarum Kabupaten dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2017 - 2022 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai%. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Pandanarum Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2017-2022 mencapai 95% Sumber: LKj IP Kecamatan Pandanarum (diolah) 583

ilavah kecamatan
dan prasarana
Peningkatan sarana
Wilayah
Prasarana
eningkatan Sarana
ntensifikasi Pajak Daerah
ruangan daerah
tensifi tensifi aerah mingk tlayah ningk an

Sumber: LKj IP Kecamatan Pandanarum (diolah) Banjarnegara dapat diserap secara baik. dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2017 - 2022 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2017-2022 mencapai 95% dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Pandanarum Kabupaten lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai%. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Pandanarum

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pandanarum agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- 3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Banjarmangu. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

b. Kelemahan (Weakness)

- Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- 3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)

- Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)

- Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipasif.

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pandanarum menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

- Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
- Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 5) Belum terpasangnya alat komunikasi (Telepon)
- 6) Masih kurang dan lemahnya jaringan internet
- Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- 4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
- Kurangnya tertib administrasi desa

- Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
 - Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
 - Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
 - Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya
 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - Masih belum sesuainya data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
 - 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
 - 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
 - Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Meningkatnya angka perceraian
 - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Pandanarum dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN , Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
- f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
- g. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
- h. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) programprogram peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).

j. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan sasaran merupakan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran bertindak sebagai jembatan bagi visi dan misi menuju prioritas program.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
 Meningkatkan kualitas pelayanan	1.1.Meningkatnya Indeks Inovasi
publik	Daerah
2. Meningkatnya Efektivitas dan	1.2.Meningkatnya nilai survey
transparansi pelayanan publik	kepuasan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.3.Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas apatur.
 Meningkatkan tertib administrasi	1.4.Meningkatnya tertib administrasi
desa	desa

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

1				1						l
	0			-			 	1		1
		1	1	1			1		1	l
							 			-
			1		1	1			1	1
			0.0000000000000000000000000000000000000	Service Control of the Control of th			000000000000000000000000000000000000000	No consumos o		
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						 			
	1			1	1	1			1	l
							25-20-20			
			l	1			 1.			
				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF			 			
	- 1		ı	1						l

4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

	_			
No No	-			
Tujuan	2	Meningkatn ya Efektivitas dan Transparasi Layananan Publik		
Sasaran	ω	Meningkatny a Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik		
Indikator Sasaran	4	Nilai IKM		7 HOW L
Program dan Kegiatan	OI.	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelaksanaan Nonperizinan
Indikator Kinerja Program	6	Persentase Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik		¥
Satuan	7	%	%	Lapora
Kond isi Awal 2022	8	100	100	12 bln
Ŋ	9	100	100	12 bln
N	10	100	100	12 bln
2025	11	100	100	12 bln
2026	12	100	100	12 bln
Target Akhir Renstra	13			

			** ***
Prog Pemi dan Peng Pemo Desa	Pe Va Di	Pr Sa Pr	Pel Ur Per de pe
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha
aan asan asan ntah	naan ntaha hkar Cam	lasi laraa dan a	naan Itaha Irkait Ian In No
	at n		р р
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa			
inaar inaar iwasa rintal ia			
ha h		Q.	
	laporan	dokume n	dokume n
	р	n	
	1	1	400
	1	1	400
	1	1	400
	1	н	400
	-	1	400

			2	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Pemerintahan Desa
	dokume n	dokume n	dokume n	
	1	1	1	
	1	1	1	
	1	1	1	
	1	1	1	
	1	1	1	

Persentase Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Kabupaten / Kota	De Ke	Pe Pe Pe Pe Pe	Fas Per an Ket dar Um
Persenta Penunja Urusan Urusan Pemerin Daerah Kabupat Kota	nda sa llaya	Fasili Penyu Progra Pelaka Pemb Masya Desa	Fasilita Penyele an Ketente dan Ket
Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum
n/	si ing ing	nan dar aan aya kat	ggai uma rtib
В	an	an	n an
Ad Ur Pe Da			
Adminis Umum Perangk Daerah			
Administra Umum Perangkat Daerah			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			

	18			
	,			
200×777777	> 10 F C H	Сиси	× 11 7	עעעא
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pejak, dan Perizinan Rendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
vedi elih elih k, cih k, cih lara	yedi lun lber dan	yan	edi an I	edi: lata ingl
hara hara hara hara hara hara hara hara	ika: ika: Lis	aar Kar	ogi	aan n d cap
lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan,	si aya trik	ntor	istil	an
В	,			

Pen Pen cov ting dar	Pro Pen Ma Des kelı	Peng Sara Prass Gedu atau Bang Lainr	Per Ru Sar Pra Ger dar Lai	Perr Reh Ged Ged dan Lai
Pembinaangan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan Kleurahan	Program Pemberdayaan covid 19 di Masyarakat tingkat desa Desa dan kelurahan Kleurahan	Pengadaan Sarana dann Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	д д			

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Ko ta
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		***
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BAB V

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Pandanarum dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

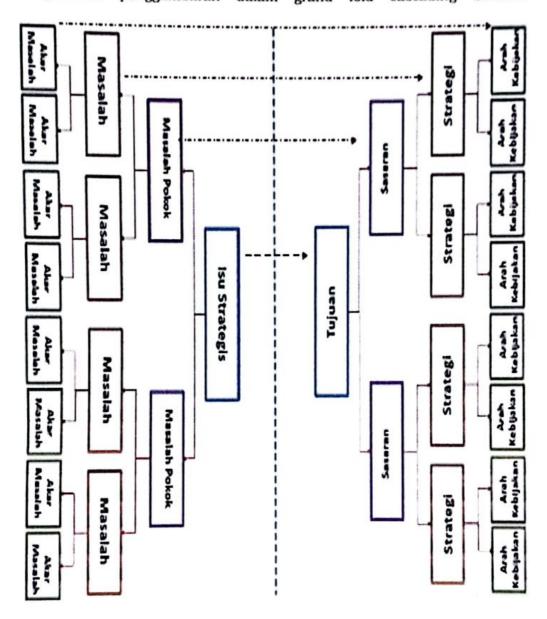
5.1.1. Strategi

- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
- 2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
- 3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN
- 4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
- Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
- 7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa

5.1.2. Kebijakan

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
- 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PATEN
- 4. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK
- Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
- Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Kecamatan Bawang disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Pandanarum Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah;	-Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah;
Meningkatnya kualitas layanan public	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	-Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau;	-Mengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau;
		- Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa;	-Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan;
		-Peningkatan parti s ipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan;	- Meningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK;
		-Peningkatkan kapasitas tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa;	-Meningkatkan kapasitas tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa;
		-Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptkan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;	-Meningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptkan ketentraman, ketertiban dan keamanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan Sub Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan dalam Renstra 2023 -2026 mendatang adalah sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
 Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi
 - Sub kegiatanKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatanKoordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua
) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daearah Penunjang urusan pemerintahan Daerah terdiri dari 4(empat) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
 Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu
 - a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana
 Pelayanan Umum yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahanan Desa terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PD KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA

											2	Vinanta Dan	Man K	manaka Pe	ndanasn		- Contract of the Contract of
		PE			Capalan	2022	22	2023		2024	*	2025 2026		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023	akhir
Tejman	1	. 5 [[Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Regiatan (output)	Tahun Perencan	Target	P _p	Targe	Ş	Target	Σ.p	t age	R P	Target	2	Tuget	3
		•			(2022)								-		+	100	20
Sk.	Menung	E	PROGRAM PENUNJANG	Persentase penunjang urusan		100%		100%		100%		100%		100%	_	100%	
-	kamya	2	URUSAN PEMERINTAHAN	pemerintahan daerah kabupaten yang				_	_			_	_				
Elektryt	Dicktrat	F	DAERAH	terlaksana													
as dan	as dan	K										_	_			_	
Transpar	Transpa .	K.													_		
200	iscs.	3										_		_		_	
revenuen		11													_		
i men	Layana	THA.											_	_	_		
Publik	n Publik	tan															
													-		-	-	
Mennek	Mening	EN	Perencanaan, Penganggaran,	Terpenuhinya Perencanaan		100%		100%		100%		100%		1000		-	
rions.	Karnya	2	dan Evaluasi Kinerja	pengganggaran dan evaluasi								_	_				
a	Dicktoric	K	Perangkat Daerah	kinerja perangkat daerah													
_	-	<												_	_		
Transpar															_		
25	ademe	20											_		_		
Leyenan	PETER	8												_			
-	Layana																
Publik	a Publik	tan															
							1016.000	+-	1510	0	20000	×	20000	*	-+-	8 dokumen	2.000
Menngk 1	Mening	EN	Penyusunan Dokumen	Jumiah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar			1.010.200	doku	000	dokume	00	doku	8	dokume	00		2
atriya	C Can	B	Perencanaan Perangkat	Real Sasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasii					1000000	1				,			
1	Kunta	2	Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Capalan						:		-					
Peryelen :	bilitas	7		Kinerja dan ikntisar kealisasi kinerja okru													
STATE OF THE PARTY	•	ď															
Derint	-	9															
B-	2000										_						
Daerah		U															
	9	****											ŭ e				2,710
	13-21						W					_					
, ,		-															577
	Dacran											_					200
╀	ł	t	Page 1	lumlah peralatan dan perlengkapan			790.000	14	1.850.	14	1.850.0	14	1.850.0	14	1.850.	14 laporan	1.000.
Meningk N	Moning	N	Koordmasi dan Penyusunan	kantor vang terpenuhi				lapora	000	_	8		8	laporan	000		0
-	_	Pt.	Laporan Capasan Kmerja dan	Patitot Auf en bennere	_			.				_					
2	_	2	Ikhtisar Realisasi Kinerja														
_	_	1 5	SKPD		_			_						HE.			
-	Secure	5			_						-						
-	- converse	7															

00			ran SKPD	nggaraa OP	
8			ran SKPD	_	ggaraan Pemerint ah
00		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Drighten / Harrist American / Commons		Penyelen
-		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Laporan Keuangan		atnya
12 11729 12		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Koordinasi dan Penyusunan	Daerah	
				tahan	
				2 2	Daerah
				nggaraa OP	ah
	_				Pemerint
					Penyelen
men			Keuangan SKPD	<u>ω</u>	Kualitas
000	0	dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	dan Pengujian/Verifikasi	ktikan ai	Meningk atnya
20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2	60.600		-	-	
				Daerah	
				tahan	
				emern	Dan au
	_			n Kanaa Cr	ah Tarah
					Pemerint
					ggaraan
					Penyelen
/12				_	Kualitas
566.0	.468	dan Tuniangan ASN	Tunjangan ASN	Mening Nu	Meningk
			+	1	
			,	*	Publik
			_	jo	25
	_				Lavanan
			_	Transpa Ke	raderrara
				as dan M	Transpar
				Efektivit IK	FICKUVII
.468	.468	henangan Perangkat daerah	Perangkat Deerah	-	amya
1.577.537 100% 100%	1.577.5	Terpennhinya Administrasi	111.00	_	Meningk
				-	
_	_			Daerah	
				ntahan	
	_			Den .	
				B &	Dacrah

Meningk Mening I atnya katnya Efektivit Efel	Meningk Mening atnya katnya Efektivit as dan Transpar Transpa Layanan Transi Layanan ransi an n Publik n Publik	Meningk Mening attrya Efektivit as dan Transpar Transpar Layanan Layanan Tuyanan Transi Layanan An Transpa Layanan Transi	Meningk Mening atnya kennya Efektivit Efektivit as dan as dan Transpar Transpa asi Layanan Layana an n Publik Publik	Meningk Mening atnya katnya Efektivit Efektivit as dan as dan Transpar Transpa asi ransi Layanan Layana Publik n Publik	Daerah
Nil Pengada ai Gedung IK lainnya	Nil Pengal Penga	NE Pen RE Kar Kar Kar Kar Tina Ca Tina Tina		Ni Ada	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Iainnya	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerab	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrad Umam Perangkat Deersh	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Terpenuhinya Barang Milik Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Jumiah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disedakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	
-		31.846,00 0		31.846.00	
	100%	8 paket	1 paket	100%	
20.00		75.00 0.000	15.00 0		
1 Unit	100%	8 paket	1 paket	100%	
		75.000. 000	15.000		
\dashv	100%	8 paket	1 paket	100%	
1		75.000. 000	15.000		
_	100%	8 paket	1 paket	100%	
		75.00 0.000	20.00		
	100%	32 paket	4 paket	100 %	
		75.000 000	65.000		angrālini

			Meningk atnya Efektivit as dan Transpar asi Layanan an Publik	Meningk atnya Efektivit as dan Transpar asi Layanan an Publik	Meningk atnya Efeknivit as dan Transpar asi Layanan an Publik	Transpar asi Layanan an Publik
			Mening katnya Efektivit as dan Transpa ransi Layana n Publik	Mening katnya Efektivit as dan Transpa ransi Layana n Publik	Mening katnya Efektivit as dan Transpa ransi Layana n Publik	as dan Transpa ransi Layana n Publik
L			TE CO KK KE EL EL	Tan Ke	Tan Ca Ne	E DE CE K
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemermtahan Daerah	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenthinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disedalan
	100					
	10 unit					
	14.390.00	14.390.00	57.138.62	11.100.00	68.238.62 4	
-	unit		3 orang /bula n	12 Іарога п	100 %	
	0.000		8.624	0.000		
	10 unit		3 orang/b ulan	12 laporan	100 %	
	25.000.		60.738 624	11.100.		
	unit	700	3 orang /bula n	lapora n	100 %	
	25,000		60.738. 624	11.100.		
	10 unit	100 %	3 orang/b ulan	laporan	100 %	
	25.00 0.000		60.73 8.624	0.000		
	10z unit	100 %	3 orang/bui jah	12 laporan	100%	
	:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::		£1.3	2000		

				A se of se of second	And a series of the series of
				"Erdaflage	£ \$. \$ 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 4 8 8 8 8 8
Sengune Length	Permetherant, Petablicas Service des Praserva Gedung Gester etca Semplante Lestina	henderen fetables kreu de hanne henden jeden kreu en lagen Lama	PERMANA PERM PERMETANGANA PENETANANA PERM PENETANANA PERMANA	Nie A Gertlan Proditora Pracan to Sem Repassions X	* Liverinas Senta tespo * responsivina and " recu- tuen * resolution in testo te * resolution * resolution te * resolution * resolution te * resolution * resolution
end prospering to several results on sections.	Carton Share Trained and County States Share Trained and Share Share Section	באים היצא ופני העבאן אנים	Prosentas perpelenganas penerantha (sa pinyusa Palik	Petakennaya Lordinasi Saceyi benya Pennghai Poeta da, san laband Petaki yaq Petaki bisan Pendibasan Seras da Paseran Prisyana Tanan	men isonere desperation mon- lettes and inter the services and peters the peters of the services and
		0			
		0			
		0			
	l s	N g	8	8	N \$ -
900	. 8	5987 1868			5 8 8 8 8
	į	0	8	8	a description
8	17.500	o			28 88
	[8	o	8	8	8 S
8	25.000	0			\$8 88
	8	0	8	ğ	a define
8	80	6			25.00
	8	0	8	18 ×	Adokuman
8	74.50				25,000 92

Wennings Ethican Ethican Incorpus In Publik	Mennys Descript Descript	Meningk atnya Elektivit as dan Transpar as: Layanan
. S. E. S A & S & . P Z	es esessistati	R and Steek
Xx		
R. Probleman Drypes Proproduction vag Diffequation Lepade Corner	1	
Perindensary Ureas Perindrahas yang dilimpahkas bepada camad	luman Doumen kin Persingh Leans lang Diassanson	Juman Laporan Pelaksahaan Non Pertinan pada Urusan Pemerintahan
	5.159.800	5.159.800
3	10 doku men	lapora n
	1.500 000 000 000 000	5.533.
3	dokume n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	
	1.500 0 00 00 7.000.0	7.000.0
ğ	men men 12	12 lapora n
	7.500.0 00	7.500.0
ğ	dokume n n laporan	12 laporan
	7.500.	7.500. 000
9	366 Pergnan	48 Japoran
8.00	5.533. 0	5.533.

		Menungk Tamya Efektivit as dan Transpar asi Layanan an Publik	Publik
		Menna ghat a gha	Tra nasp nasp nasi nasi lay nasi Pub
Loordinasi Upsys Penyelenggaraan Letemteraman dan Leterthea Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	N 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkala dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	H B H B B B B B B B B B B B B B B B B B
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan keteriban umum	Juman Laboran Peaksanaan Kewenangan Lan vang Dimoshkan (Jumlah SPPT PBB yang tensalunkan)	
0	0		
0	•		
0	•	25.703.70 0	
0	0	lapora n	
		35.03 2.100 1	
100	100	laporan	
		37.000. 000	
100	100	lapora n	
		37.000 000	
100	100	laporan	
		37.00 0.900	
100	100	4 laporan	
conduct const		230.000	

			Harmonsaasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERUNTAHAN UMUM	- Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah													
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tugas Forkompinca yang dilaksanakan	100%		9.600.00 0	men 4	9,600.	dokume n	9.600.0	doku men	9.600.0	dokume n	9.600.	4 dokumen	9.600.C
Menungk atnya Efektwit as dan Transpar asi Layanan an	Meningka tnya Efektivita s dan Transpar ensi Layanan	Kee Kee	PROGRAM PEMBUKAAN DAN PEMBAWASAN PEMERUNTAHAN DESA	Prosentaso pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%		100%		100%		D 6	.000	1 Dess	25.00 0.000	100	
Meningk atnya Efektivit as dan Transpar asi Layanan an Publik	Mening karnya Efektivit as dan Transpa rans Layana n Publik	E B B B K K B B Z	Pasilitzai, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
Mennegk stryp Elektrone tu dan Thouper ss Lejanosin to	Mening kampa Efektivit sa dan Timaspa Punsi Lepana a Publik	BEREZERS	Pasilian Penjususa Penjura Desa dan Perduran Kepala Desa	Juman Dotumen yang Difabilitas dalam rangka Penyudunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
Monage Monage Exicus Sixon Sixon Transper	Mening kanaya Efektora sa dan Toranga natas	SEXMEN	Pesitos Administres Tita Penermatun Desi	Junian Documen sang Ditabilitas dalam nangsa Administrasi Tata Remembahan Desa				men 9	6 00	dokume n	dokume n	6 000	dokume n	dokume n	6 900	9 dokumen	in playing the
-																	

40.000	9 laporan	40.00 0.000	9 laporan	40 000. 000	9 lapora n	40.000. 000	9 laporan	38.73 8.900	lapora n	Jumah Laboran Hasil Koordinasi Pendambingan Desa di Wilayahnya	Paulizas Pendampingan Desa di Wilayahnya			
										Juman Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasiliasi Pegyusutan Program dan Pelaksanaan Pembertayaan Manyaraksi Desa			
												6.0	n Pubis	Layanan an Publik
										1547-4477		2 %	r Transpa	Transpar
-			:		men				-	Ketertiban Umum		K 5	as dan	as dan
-		800	dokume	00	doku	00	dokume	800	doku	Perweienggaraan Ketenteraman dan	Necentraman dan Necertiban	-		atnya
-	9 dokumen	2.691.	9	2.691.8	9	2.691.8	9	2.691.	9	Jumiah Dokumen Fasilitasi dalam I rangka	Passittasi Penyelenggaraan	N. N.	-	Meningk
												S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	n Publik	Publik
-					150							2	Layana	Layanan
-												2	ISURI	851
-												No.	r Transpa	Transpar
										Desa		×	as dan	as dan
			ם	,		,	=		men	dengan Pembangunan	Pembangunan Desa	-	Efektivit	Efektivit
-		0	dokume	dokume	0	dokume	dokume	0	doku	Perencansan Pembangunan Daerah	Pembungunan Daerah dengan	P	_	atnya
1	9 dokumen	14 00	9	9	14.00	9	9	14.00	9	Jumah Dokumen Sinkronisasi	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	N.	Mening	Meningk
		c	n dokume	n	c	dokume	dokume n	0	doku men	rangka Penge olaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pendilyagunian Avec desa			
_	9 dokumen	11.00	. 9	. 9	11.00	. 9	9	11 00	9	Jumah Dokumen yang Difasilitasi dalam	dun	-		
-													n Publik	Publik
_												TO A	Layana	Layanan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelavanan pada bidang bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Pandanarum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pagedongan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang diamanatkan kepada Kecamatan Pagedongan.

Tabel dibawah ini akan menyajikan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2023 - 2026

NO	Indikator	BATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Tar	get Capa	ian Beti	ap Tahu	n	Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD (2026)
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Angka	83,10	84,20	84,35	84,50	84,75	85	85
2	Nilai AKIP	NILAI	CC	В	В	В	В	В	В

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Pandanarum Tahun 2023-2026 merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan merupakan produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Pandanarum dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026.

Pada penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pandanarum yang dibuat setiap tahun Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

Selanjutnya Rencana Stategis (Renstra) OPD disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Renstra PD berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu tanpa dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya mustahil seluruh tujuan dan sasaran dalam renstra ini dapat dicapai.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah lnsha Allah pada pelaksanaannya nanti dapat mendukung tercapainya visi Banjarnegara 2023 - 2026 "

> CAMAT PANDANARUM 19721007 199903 1 007

Banjarnegara,